

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN *IN ABSENTIA* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:
Siti Rahmawati
NIM. 2205040012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai penyidikan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, serta mengkaji dasar hukum dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai mekanisme penyidikan *in absentia* dalam peraturan perundang-undangan, sementara praktik tersebut telah diterapkan dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi terhadap tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana analisis yuridis penyidikan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, tujuan dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana analisis yuridis penyidikan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan penyidikan *in absentia* pada perkara tindak pidana korupsi, pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur mekanisme *in absentia* pada tahap persidangan, sedangkan pengaturan penyidikan *in absentia* juga belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dan menyebabkan pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang melarikan diri hanya didasarkan pada kebijakan administratif internal. Kesimpulannya oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme penyidikan *in absentia* secara komprehensif guna memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Penyidikan, *In Absentia*, Tindak Pidana Korupsi

LEGAL ANALYSIS OF IN ABSENTIA INVESTIGATION IN CORRUPTION CASE

By:
Siti Rahmawati
NIM. 2205040012

ABSTRACT

This study aims to provide a juridical analysis of the legal framework governing in absentia investigations in corruption cases, as well as to examine the legal basis and issues arising from their implementation. The study is motivated by the absence of explicit statutory regulations regarding the mechanism for in absentia investigations, even though the practice has been applied in several corruption cases involving suspects listed on the Wanted List (DPO). The research problem focuses on the juridical analysis of in absentia investigations in corruption cases, with the objective of understanding this analysis. The study employs a normative juridical legal research method, utilizing both the statute approach and the case approach. The findings reveal a legal vacuum regarding the regulation of in absentia investigations in corruption cases; Article 38 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 (as amended by Law Number 20 of 1999) on Corruption Crimes only regulates the in absentia mechanism at the trial stage, while the Criminal Procedure Code (KUHP) also fails to address in absentia investigations. This situation leads to divergent interpretations among law enforcement officials and results in investigations against fugitive suspects being based solely on internal administrative policies. Consequently, the study concludes that specific regulations comprehensively governing the in absentia investigation mechanism are required to ensure legal certainty.

Keywords : Investigation, In Absentia, Corruption Offense